

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MARJINAL
(Studi Kasus KPR Dalam Memberdayakan Perempuan Pada Kelompok “Batik Melati” Di Desa Karanglo Kerek Tuban)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi: Studi Islam



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Oleh:
UMMI LATHIFATUN NI'MAH
NIM F52918029

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Ummi Lathifatun Ni'mah

NIM : F52918029

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Juni 2020

Saya yang menyatakan,



Ummi Lathifatun Ni'mah

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Pemberdayaan Perempuan Marjinal”

(Studi Kasus KPR Dalam Memberdayakan Perempuan Pada Kelompok “Batik Melati” Di Desa Karanglo Kerek Tuban) yang ditulis oleh Ummi Lathifatun Ni'mah ini telah disetujui pada tanggal 18 Mei 2020

Oleh:

PEMBIMBING I



Dr. H. Suis Abdullah, M.Fil

196201011997031002

PEMBIMBING II



Dr. Hj. Rr.Suhartini, M.Si

195801131982032001

PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

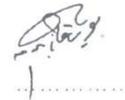
Tesis berjudul “Pemberdayaan Perempuan Marjinal (Studi Kasus KPR Dalam Memberdayakan Perempuan Pada Kelompok “Batik Melati” Di Desa Karanglo Kerek Tuban)” yang ditulis oleh Ummi Lathifatun Ni'mah ini telah diuji dalam Ujian Tesis

Pada tanggal 09 Juli 2020

Tim penguji

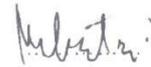
1. Dr. H. Suis, M.Fil.I

(Ketua)



1. Dr. Hj. Rr. Suhartini, M.Si

(Sekretaris)



2. Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag

(Penguji I)



3. Dr. H. A. Saepul Hamdani, M. Pd

(Penguji II)



Surabaya, 14 Juli 2020



Direktur

Dr. H. Aswadi, M.Ag

NIP.196004121994031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ummi Lathifatun Ni'mah
NIM : F52918029
Fakultas/Jurusan : Pascasarjana/Studi Islam
E-mail address : el_faqyrah@yahoo.co.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Pemberdayaan Perempuan Marjinal (Studi Kasus KPR dalam Memberdayakan Perempuan
pada Kelompok “Batik Melati” Di Desa Karanglo Kerek Tuban)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

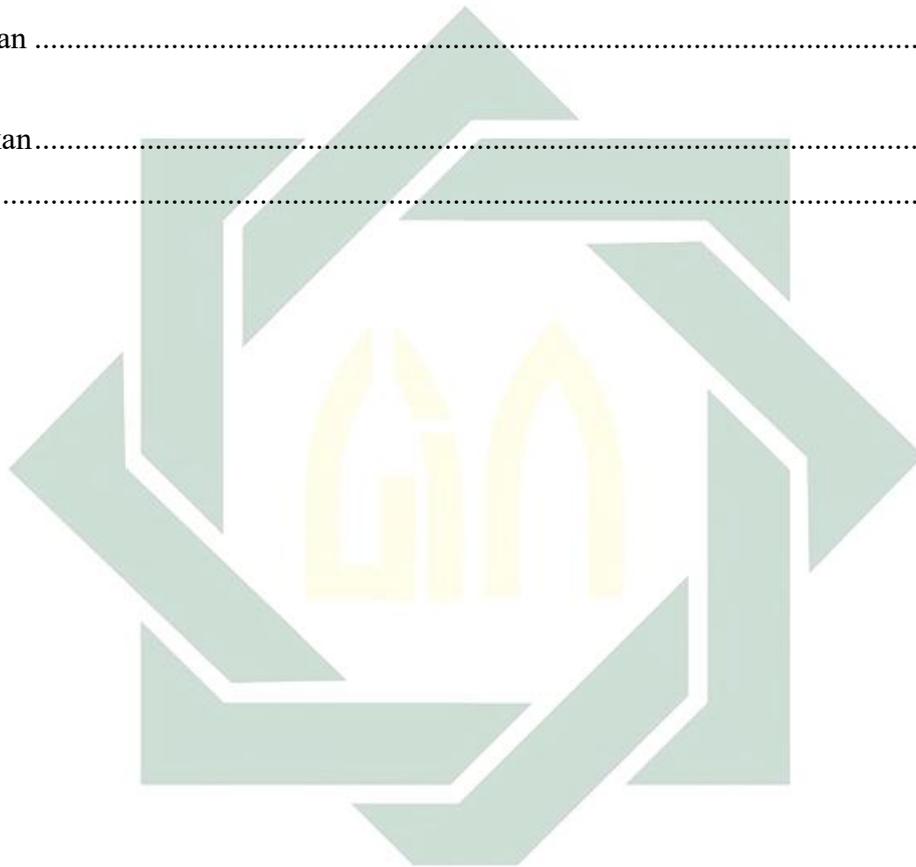
Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Oktober 2020
Penulis

(Ummi Lathifatun Ni'mah)

B. Tinjauan <i>community development</i> KP Ronggolawe Berdasarkan Teori Jim Ife	102
1. Peran KP Ronggolawe dalam Pemberdayaan Perempuan Menurut Ife.....	102
2. Strategi KP Ronggolawe dalam Pemberdayaan Perempuan Menurut Ife	109
3. Kontribusi KP Ronggolawe Berdasarkan Konsep Jim Ife.....	112
C. Manifestasi Pemberdayaan Perempuan Oleh KP Ronggolawe	113
 BAB V Penutup	 121
A. Simpulan	121
B. Saran	122
 Daftar Rujukan.....	 123
Lampiran	



Semen Indonesia. Sebagai perusahaan BUMN yang berada di lingkungan pedesaan maka sudah seharusnya PT. Semen Indonesia memberikan impact terhadap warga sekitarnya, salah satunya adalah dengan bantuan CSR pemberdayaan perempuan melalui kelompok yang didampingi oleh LSM KP Ronggolawe. Kelompok batik tersebut berada di desa Karanglo, Kerek, Tuban yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Merakurak.

“Batik Melati” berdiri pada Agustus tahun 2016, didirikan oleh seorang perempuan desa bernama Mbak Ti’ah. Awalnya mbak Ti’ah sebatas belajar membatik manual secara otodidak sejak 2015. Lama kelamaan, ia tertarik untuk menekuni batik dan pertemuannya dengan KP Ronggolawe yang diketuai oleh Nunuk Fauziyah membawanya bertekad untuk membentuk kelompok “Batik Melati”. Kelompok “Batik Melati” resmi berdiri pada tahun 2017. Kelompok tersebut terbentuk berasaskan kekeluargaan dan terbentuk atas kesamaan hobi dan kegiatan yang sama yaitu membatik. Sebagai kelompok batik yang baru berdiri, tentu banyak tantangan dan hambatan yang dialami oleh kelompok “Batik Melati”. Sebagai komunitas kecil, tentunya kelompok “Batik Melati” mengalami beberapa hambatan ataupun kendala. Permasalahan di lapangan seringkali muncul baik dari personal, maupun pendamping kelompok. Minimnya pengetahuan akan batik, pengetahuan akan teknologi digital dan kurangnya ilmu tentang pemasaran batik juga menjadi permasalahan yang dihadapi oleh kelompok ini. LSM KP Ronggolawe hadir sebagai awan cerah pemberi harapan bagi komunitas kecil di desa Karanglo ini. Melalui pendampingan, pelatihan, bantuan dana serta pemasaran produk, para anggota

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti memfokuskan penelitian pada KP (koalisi perempuan) Ronggolawe di Desa Karanglo, Kerek, Tuban dengan keadaan desa yang secara geografis mengalami kerusakan lingkungan akibat dari pengerukan yang dilakukan PT. Semen Indonesia yang menjadikan para kaum perempuan hanya bertumpu pada penghasilan suami. Selain itu kemiskinan perempuan di pedesaan membutuhkan jalan keluar sebagai penyelesaiannya. Dengan merangkul beberapa perempuan untuk belajar batik, dan membuat batik memiliki nilai jual tinggi di pasaran dan berdaya secara kemampuan serta wawasan para perempuan berdedikasi dalam satu kelompok membuat batik. Dengan mengangkat judul penelitian “Koalisi Perempuan Ronggolawe Dalam Memberdayakan Perempuan Marjinal Pada Kelompok “Batik Melati” Desa Karanglo Kerek Tuban” peneliti berharap dengan adanya kegiatan tersebut akan bisa membantu peningkatan ekonomi keluarga yang pada akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui pola dan juga strategi KP Ronggolawe khususnya pada perempuan membuat batik dalam kelompok “Keluarga Melati”. KP Ronggolawe, yang tumbuh sejak tahun 2004 dibawah naungan LSM Perempuan dan Perlindungan Anak dalam hal pemberdayaan perempuan. Kelompok tersebut tumbuh dan berkembang perlahan dengan keterbatasan sarana dan menghadapi berbagai kendala. Dengan meneliti pola dan strategi kelompok ini, peneliti berharap komunitas perempuan membuat batik pada “Keluarga Melati” dapat berkembang dan berkemajuan demi kesejahteraan ekonomi keluarga.

Agar dalam penyusunan karya tulis ilmiah dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh penulis, maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi dan batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Merupakan landasan teori berisi tentang perempuan marginal yang berisi tentang pengertian perempuan marginal, teori pemberdayaan perempuan, yang meliputi; definisi pemberdayaan perempuan, tujuan pemberdayaan perempuan dan teori *community development*. Membahas takaran pemberdayaan perempuan menurut Islam, yang meliputi; pemberdayaan perempuan dalam Islam dan pemberdayaan perempuan sebagai peningkatan kesejahteraan.

Bab III merupakan data umum tentang KP Ronggolawe, meliputi latar belakang berdirinya, Dasar dan Tujuan Berdirinya KP Ronggolawe dan berisi tentang susunan pengurus KP Ronggolawe, proses pemberdayaan perempuan. Membahas tentang definisi khusus pemberdayaan perempuan oleh KP Ronggolawe. Selain itu, pada bab ini peneliti juga membahas memaparkan data pengorganisasian KP Ronggolawe, strategi KP Ronggolawe dalam memberdayakan kelompok “Batik Melati”, pengalaman kerja KP Ronggolawe dan kontribusi KP Ronggolawe. Selanjutnya, peneliti memaparkan data Kelompok “Batik Melati”, yang meliputi Desa Karanglo Sebagai Lokasi Kelompok “Batik Melati”, pemberdayaan perempuan melalui kelompok “Batik Melati”, struktur kelompok “Batik Melati”, Hambatan KP Ronggolawe dalam

Paradigma yang mengemuka sebagai isu sentral *community development* merupakan reaksi atas kenyataan munculnya kesenjangan yang belum tuntas terpecahkan terutama antar masyarakat di pedesaan, kawasan terpencil dan terbelakang. Padahal pertumbuhan ekonomi secara nasional terus mengalami peningkatan. Kemudian bentuk tujuan dari *community development* adalah keadilan sosial dengan memberikan ketentraman kepada masyarakat yang lebih besar serta persamaan politik dan sosial melalui upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan langkah kecil guna tercapainya tujuan yang lebih besar. Memberdayakan masyarakat memerlukan rangkaian proses yang panjang, agar mereka lebih berdaya. Proses pemberdayaan cenderung dikaitkan sebagai unsur pendorong sosial ekonomi dan politik. Berdasarkan pengertian pemberdayaan diatas, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan terwujud sebagai redistribusi kekuasaan, apakah antar negara, kelas, kasta, ras, gender atau individu.

Berdasarkan pemaparan kedua tokoh di atas, peneliti menyimpulkan bahwa, *community development* yang dikemukakan oleh Robert Chambers lebih menekankan pada antisipasi atau langkah untuk mencegah kemiskinan yang berkelanjutan melalui suatu program yang fokus pada pembangunan ekonomi, sehingga pemberdayaan masyarakat dirancang sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sedangkan *community development* menurut Jim Ife menitikberatkan proses pemberdayaan yang fokus pada pemilik kuasa atas program pemberdayaan dan kelompok lemah, sasaran atau obyek pemberdayaan.

masyarakat. Maka pada tanggal 14 Februari tahun 2004 dengan penuh pertimbangan dan harapan akhirnya Koalisi Perempuan Ronggolawe di deklarasikan. Koalisi Perempuan Ronggolawe merupakan yayasan independen, non partisan non profit.

KP Ronggolawe berdiri berdasarkan akte notaris Nomor 09 tahun 2015 (perubahan dari tahun 2005) oleh Miqdarulridho, SH. Dan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan nomor AHU-0032628.AH.01.04.Tahun 2015. Koalisi Perempuan Ronggolawe yang memiliki komitmen melakukan advokasi kebijakan publik, pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak, pendidikan alternatif berbasis gender supaya memperoleh hak dasar pendidikan dan mendorong kemandirian perempuan di wilayah pedesaan, pemberdayaan masyarakat untuk mendorong kemandirian dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi pedesaan serta penyuluhan dan bantuan hukum bagi masyarakat marginal.

Pada tahun 2011 KP Ronggolawe Tuban bersama PT SG menggelar pelatihan dan pemberdayaan terhadap perempuan di sekitar pabrik SG di Tuban. *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah program pemberdayaan yang berkelanjutan. Entah apa yang melatar belakanginya hingga program CSR yang dilakukan PT Semen Gresik Tbk (PT SG) terhadap perempuan dari sejumlah desa Ring I pabrik PT SG di Tuban berhenti di tengah jalan.

Paling tidak hal itu ditemukan dari program pelatihan yang dilakukan PT SG yang bekerja sama dengan Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) Tuban yang disentralkan di Desa Margomulyo, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban. Program yang harusnya berkesinambungan ini, harus terhenti karena tidak

ditindaklanjuti. Dalam program pemberdayaan itu sendiri, KP Ronggolawe membuat program ketrampilan untuk penyiapan ekonomi produktif, manajemen dan pemberdayaan perempuan dan HAM. CSR merupakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab perusahaan dengan target menyiapkan warga agar mandiri. Tidak lagi berorientasi pada tuntutan dipekerjakan di perusahaan, dengan modal pendidikan dan keahlian pas-pasan. Apalagi tidak semua warga bisa direkrut di pabrik semen PT SG dikarenakan BUMN memiliki standar karyawan struktural sesuai mazhab profesional. Pemahaman yang keliru apabila perusahaan tidak mengawal warga hingga memiliki ketrampilan. Bahkan, patut pula perusahaan memberikan bantuan permodalan ketika mereka telah siap meniti profesi dalam bidang sesuai kehendak dan bakat, sekaligus sesuai dengan potensi alam yang dimilikinya. Disitulah pentingnya peran organisasi di luar *corporate* yang ahli dibidangnya, seperti KPR Tuban. Kaum perempuan desa ring I pabrik PT SG di Desa Sumberarum, Kecamatan Kerek, Tuban, sejak pabrik berdiri belum pernah mendapatkan program CSR yang berkesinambungan secara utuh. Jika KP Ronggolawe telah memulai program pemberdayaan yang berkesinambungan, tentunya sangat disayangkan jika tidak diteruskan sampai tuntas. Apalagi pada tahap awal ini hanya diikuti 20 perempuan dari desa-desa ring I. Sehingga daya cakupnya pun sangat jauh dari harapan.

2. Dasar dan Tujuan Berdirinya

Pendidikan setidaknya dapat memberi ruang bagi sosial pendidikan yang secara kritis mempertanyakan struktur ekonomi, politik, perangkat sosial, gender, serta hak asasi manusia. Ketika pendidikan dinggap sebagai suatu pondasi yang

sangat substansial dalam segala aspek kehidupan, maka pendidikan dapat memainkan peran yang penting untuk sebuah perubahan atau transformasi sosial politik menuju ke suatu sosial yang lebih demokratis dan adil. Sebaliknya pendidikan juga terkadang dapat dan sering digunakan sebagai alat untuk melegitimasi sosial dan struktur politik yang ada. Satu hal yang membuat hal miris adalah bila melihat kenyataan kelas ekonomi rendah yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi padahal mereka mempunyai kemampuan dan prestasi yang cukup. Pada dasarnya mereka juga berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan mereka merupakan generasi bangsa ke depan untuk membawa bangsa lebih maju. Memperhatikan hal ini, maka peran dari LSM sangat diperlukan sebagai satu elemen masyarakat yang memberikan proses penyadaran dalam dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Berbicara mengenai dasar dan tujuan berdirinya KPR (Koalisi Perempuan Ronggolawe) adalah membicarakan tentang visi misi dari organisasi tersebut. Sebagai LSM di bidang sosial dan kesetaraan gender, KP Ronggolawe memiliki visi terbangunnya kesamaan peran gender dalam mendapatkan Hak serta akses ekonomi, sosial, politik, HAM dan budaya secara adil serta mengangkat martabat perempuan. Selain itu, KP Ronggolawe memiliki misi dalam memberikan pemberdayaan, utamanya kepada perempuan. Diantara misi KP Ronggolawe adalah sebagai berikut:

- a. Melibatkan perempuan dalam tiap-tiap kebijakan publik.
- b. Mengembangkan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia khususnya perempuan melalui pelatihan, pendampingan, seminar dan kampanye.

- c. Mewujudkan pendidikan non formal sebagai pintu masuk untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan dan kesetaraan gender.
- d. Advokasi dan pendampingan terhadap korban kekerasan anak dan perempuan secara terpadu.

Berdasarkan pemaparan visi dan misi KP Ronggolawe tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa hadirnya KP Ronggolawe di tengah-tengah masyarakat dapat membantu perempuan lebih berdaya dan memiliki kesetaraan dengan laki-laki, yang bertujuan untuk membentuk pribadi yang mandiri sebagai capaian kesejahteraan dan meredakan konflik bias gender. Konsep tujuan pemberdayaan perempuan ini, dilakukan melalui beberapa gerakan seperti penyuluhan, pendampingan dan pelatihan pemberdayaan dalam komunitas. Sedangkan tujuan didirikannya KP Ronggolawe adalah sebagai berikut:

- a. Berperan mengembangkan berbagai pendidikan non formal, pemberdayaan sosial ekonomi guna meningkatkan SDM dan pendapatan keluarga marginal serta membangun jaringan.
- b. Menjadikan masyarakat khususnya perempuan peka terhadap kondisi sosial yang bersinergi dengan isu politik, budaya, perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak, HAM, dan pendidikan.
- c. Berperan menjadi lembaga kemitraan dalam upaya pengembangan usaha produktif serta demokratisasi ekonomi berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, KP Ronggolawe perlu melakukan beberapa langkah pelatihan dan pendampingan berkelanjutan guna menciptakan dan mengembangkan usaha mikro/makro dengan melestarikan Sumber Daya

pengembangan yang dilakukan oleh KP Ronggolawe harus selalu dijaga agar tidak memperkokoh atau menciptakan hambatan-hambatan struktural tersebut. Sebaliknya harus selalu diupayakan segala cara yang mungkin dan cocok dilakukan untuk mengurangi atau meniadakannya.

c. Hak asasi manusia (*human rights*). Pemahaman dan komitmen terhadap hak asasi manusia merupakan prinsip yang penting dalam pengembangan masyarakat. Struktur upaya pengembangan komunitas harus dirancang dengan sangat mempertimbangkan agar tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia.

d. Keberlanjutan (*sustainability*). Prinsip keberlanjutan merupakan salah satu komponen penting dalam pendekatan ekologis. Keberlanjutan menuntut agar penggunaan segala jenis sumberdaya tak terbarukan seminimal mungkin. Prinsip ini mengandung implikasi praktis terhadap penggunaan lahan, gaya hidup, perlindungan sumber daya alam dan sebagainya. Dalam program pendampingan yang dilakukan oleh KP Ronggolawe terhadap kelompok “Batik Melati”, adalah melalui pelatihan kelompok. Setelah anggota kelompok dirasa sudah memiliki kompetensi membatik yang baik dan benar, maka anggota diperbolehkan untuk berdiri secara mandiri.

e. Pemberdayaan (*empowerment*). Pemberdayaan mempunyai makna dalam menyediakan sumberdaya, peluang, pengetahuan dan keahlian masyarakat untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuannya. Pemberdayaan oleh KP Ronggolawe bermakna upaya memberdayakan perempuan desa dengan ketrampilan membatik pada kelompok “Bati Melati” untuk menjadi perempuan yang berdaya dan mandiri.

f. Personal dan politik (*the personal and the political*). Kaitan antara person dan politik, individu dan struktur, masalah pribadi dan isu publik merupakan unsur pokok dalam pengembangan masyarakat. Tanpa peningkatan pemahaman komunitas tentang hubungan antara pribadi dengan politik dan sebaliknya, maka upaya pengembangan komunitas mustahil berhasil.

g. Kepemilikan masyarakat (*community ownership*). Kepemilikan mencakup kepemilikan atas barang dan kepemilikan atas struktur dan proses. Bahwa setiap anggota yang bergabung dengan kelompok “Batik Melati” adalah satu kesatuan yang berkembang bersama untuk menjadi perempuan yang berdaya.

h. Kepercayaan diri (*self reliance*). Masyarakat harus mencari pemanfaatan sumberdaya yang dimilikinya, jangan lebih tergantung pada dukungan dari luar yang berupa bantuan finansial, teknis, maupun sumberdaya lain. Setiap anggota kelompok “Batik Melati” harus memiliki *self reliance* guna *upgrading self* melalui komunitas.

i. Kemandirian (*independence from the state*). Bantuan pemerintah dalam pembangunan masyarakat sudah berjalan cukup lama. Melalui KP Ronggolawe, kelompok “Batik Melati” mendapatkan bantuan dana CSR dari PT. Semen Indonesia yang dikelola untuk kegiatan pemberdayaan kelompok batik.

j. Tujuan jangka menengah dan visi yang jelas (*immediate goals and ultimate visions*). Tujuan dari KP Ronggolawe adalah Terbangunnya kesamaan peran gender dalam mendapatkan Hak serta akses ekonomi, sosial, politik, HAM dan budaya secara adil serta mengangkat martabat perempuan. Sedangkan tujuan dari

kelompok “Batik Melati” adalah menjadikan perempuan lebih mandiri dan berdaya melalui pelatihan dan kegiatan membatik.

k. Pengembangan organik (*organic development*). Pemikiran pengembangan organik sering dipertentangkan dengan pengembangan mekanistik, pengembangan mekanistik ibarat sebuah mesin, sedangkan pengembangan organik ibarat sebuah tanaman. Kelompok “Batik Melati” memiliki kapasitas terpasang internal (*inherent*) untuk mengembangkan potensinya sendiri, dan karena itu upaya pengembangan kelompok lebih pada menyediakan kondisi yang tepat yang memungkinkan pengembangan pengembangan potensi tersebut dapat berlangsung dengan baik.

l. Pengembangan bertahap (*the pace of development*). Sebagai konsekuensi alamiah dalam pengembangan organik adalah perlunya penetapan langkah dalam mengadakan pengembangan masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam kelompok “Batik Melati” adalah terstruktur dan bertahap. Tahapan di dalam komunitas sendiri diatur dalam AD/ART kelompok.

m. Keahlian eksternal (*external expertise*). Proses atau struktur yang datang dari luar dalam pengembangan masyarakat jarang bekerja secara baik. Pemberdayaan perempuan dalam kelompok “Batik Melati” disupport oleh para *stake holder* desa dan pendamping (KP Ronggolawe).

n. Pembangunan komunitas (*community building*). Semua pengembangan masyarakat harus bertujuan membangun komunitasnya.

o. Proses dan hasil (*process and outcome*). Penekanan dalam proses dan hasil menjadi isu penting dalam pekerjaan masyarakat. Anggota kelompok

pemberdayaan akan lebih tertarik dengan hasil yang akan diperoleh. Membatik memiliki proses yang lama dan memakan banyak waktu dalam prosesnya. Dari ketelitian dan ketekunan para anggota kelompok, mereka akan memahami bahwa hasil dari pekerjaan mereka bukan hanya berkaitan dengan finansial tetapi juga menjaga batik sebagai warisan budaya.

p. Keutuhan (keterpaduan) proses (*the integrity of process*). Proses yang digunakan dalam pengembangan masyarakat sama pentingnya dengan hasil.

q. Tanpa kekerasan (*non violence*). Dalam konteks ini, tanpa kekerasan mempunyai implikasi lebih dari sekedar tanpa kekerasan fisik diantara penduduk.

r. Inklusif (*inclusiveness*). Prinsip ini merupakan bagian dari prinsip tanpa kekerasan. Upaya membangun dialog harus tetap diutamakan dalam berbagai situasi untuk mengembangkan saling pengertian. Berusaha memahami cara pandang pihak lain terhadap suatu persoalan sangat penting.

s. Konsensus (Mufakat). Prinsip tanpa kekerasan, dan inklusifness harus dibangun dalam kerangka pembentukan konsensus, dan konsensus dalam pengambilan keputusan harus diterapkan sebisa mungkin. Mufakat juga tidak dapat dipahami sekedar kompromi sederhana yang dapat mengakibatkan ketidakpuasan sebagian besar orang. Selain karena mufakat memerlukan proses yang relatif lebih lama jika dibandingkan dengan teknik pengambilan keputusan yang lain harus pula dicamkan bahwa mufakat bulat hanyalah ilusi yang tidak pernah terwujud.

t. Kerjasama (*co-operation*). Perspektif ekologis dan pendekatan tanpa kekerasan menekankan kebutuhan struktur kerjasama dibanding struktur

persaingan. Hal ini sangat beralasan karena persaingan sangat erat kaitannya dengan hasrat untuk melampaui, memasang perintang, melakukan serangan dan mendominasi pihak lain. Karena itu lebih baik berusaha menghapuskan gagasan persaingan yang sehat dan mengembangkan pemahaman dan strategi persilangan (kerjasama). Apapun bentuknya, persaingan selalu mengarah pada situasi menang/kalah (*win/loose*), tetapi persilangan (kerjasama) selalu lebih mengarah pada situasi menang/menang (*win/win*).

u. Partisipasi (*participation*). Pengembangan masyarakat bertujuan tercapainya partisipasi yang maksimal, yakni melibatkan semua anggota masyarakat dalam semua kegiatan dan semua proses yang terjadi dalam masyarakat. Pengembangan komunitas haruslah selalu berupaya menyediakan kemungkinan terluas bagi kegiatan yang memerlukan partisipasi banyak orang dan memberikan pengakuan terhadap setiap sumbangan dan kesetaraan bagi setiap orang untuk terlibat. Dalam konteks ini lagi-lagi hendaknya setiap pekerja pengembangan komunitas memahami makna partisipasi secara lebih komprehensif.

v. Pembatasan (perumusan) kebutuhan (*defining need*). Pertama, pengembangan masyarakat harus mampu menemukan kesepakatan diantara berbagai variasi kebutuhan masyarakat. Komunitas dimungkinkan mendefinisikan dan menyatakan kebutuhan yang mereka rasakan.

Berdasarkan prinsip pemberdayaan diatas, maka perlu adanya tahapan yang seharusnya dilalui dalam pemberdayaan. Proses pemberdayaan masyarakat

- b. Melakukan pendampingan kepada masyarakat khususnya perempuan untuk meningkatkan SDM, sumber daya ekonomi, posisi tawar, dan kesadaran kritis atas pelestarian SDA lokal.
- c. Memperluas dan membangun jaringan kelompok *civil society* dalam rangka gerakan demokratisasi serta aliansi jaringan strategis baik dengan Perguruan Tinggi, jaringan LSM, pemerintah, *funding agency*, dan pihak lain yang selaras dengan visi dan misi lembaga.

2. Pengalaman Kerja KP Ronggolawe

Sebagai LSM yang fokus pada pemberdayaan perempuan, KP Ronggolawe memperbesar akses dan kontrol kelompok-kelompok marginal atas dasar sumber daya ekonomi yang dimanifestasikan dalam pembentukan kelompok “Batik Melati” melalui pelatihan dan pendampingan dengan tidak menghilangkan unsur budaya (perumusan nilai, simbol, ideologi). KP Ronggolawe yang berada di tingkat kabupaten tentu memiliki program kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan melibatkan pemerintah daerah kabupaten Tuban. Sebagai LSM, KP Ronggolawe dapat memainkan beberapa peranan dalam mendukung kelompok swadaya yang dikembangkan, di antaranya adalah:

- a. Mengidentifikasi kebutuhan kelompok lokal dan taktik-taktik untuk memenuhi kebutuhan.
- b. Melakukan mobilisasi dan agitasi untuk usaha aktif mengejar kebutuhan yang telah diidentifikasi tersebut.
- c. Merumuskan kegiatan jangka panjang untuk mengejar sasaran-sasaran pembangunan yang lebih umum.

6	2007 - 2015	Fasilitator Pengarustamaan Gender dan fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) korban kekerasan perempuan dan anak	Seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah kabupaten Tuban (SKPD), Camat, Aparat Desa, BPD, Ormas, TOWA, TOGA, LSM dan kelompok perempuan	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban
7	2007 – 2016	Nara Sumber “Peningkatan Capacity Building” Bagi Pendamping/Relawan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak”.	PKK se-Kabupaten Tuban, Kelompok Perempuan, Mahasiswa, LSM dan pendidik	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban
8	2008 – 2017	Penyelenggara Program “Pendidikan Keaksaraan Fungsional”	Masyarakat buta aksara	Kementerian Pendidikan Nasional (Badan Pendidikan Non Formal dan Informal BPNFI)
9	2008	Narasumber “Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur” dalam mewujudkan Demokrasi melalui hak pilih perempuan	Kelompok Perempuan, PKK, TOWA, Mahasiswi, LSM, ORmas dan Perguruan Tinggi Se-Kabupaten Tuban	Didukung oleh Panitia Pengawas Pemilu Jawa Timur
10	2008	Nara Sumber ”Kesejahteraan Dalam Keluarga dengan memahami isu-isu gender dan UU PKDRT”.	Calon Pengantin Se-Kabupaten Tuban	Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban
11	2008	Fasilitator dan Koordinator “Pengurangan Pekerja Anak / Pendampingan Keluarga Harapan (PPA-PKH)”.	Masyarakat yang du khususnya menerima manfaat program PPA-PKH	Kementerian Sosial Tenaga Kerja dan Catatan Sipil (Pusat, Propinsi dan Kabupaten Tuban)
12	2009	Juri Seleksi Pemimpin Pemuda	Pemuda Kabupaten Tuban	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana
13	2009	Program “Pendampingan Petani Perempuan” Dalam Meningkatkan pendidikan Life Skill.	Petani Perempuan	Didukung Pemerintah Kabupaten Tuban. Kantor Informasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutani (KIPPK)
14	2010	Narasumber “Rencana Aksi Nasional dan Hak Azasi Manusia (RAN HAM)	Pemerintah Daerah kabupaten Tuban, pendidik ORMAS, TOWA, LSM dan Aparat Desa	Kantor Kementerian KESBANGPOLINMAS Kabupaten Tuban

15	2010	Program “Mendorong Perempuan Dalam Memahami Hukum yang Représentatif Terhadap Perempuan”.	Perempuan Pedesaan (kandidat komunitas desa)	Di dukung Direktorat Pendidikan Luar Sekolah
16	2010-2012	Narasumber “Konsep Reintegrasi korban dan Penguatan Pasca Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Eks Korban Kekerasan Perempuan dan Anak	Dinas Sosial Propinsi Jawa Timur dan Kantor Bidang Sosial Kabupaten Tuban
17	2011-2016	Fasilitator Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri “yang berorientasi pada pengelolaan SDA local” sebagai pengembangan kemandirian masyarakat desa	Masyarakat Perempuan Desa	BPNFI
18	2012-2016	Narasumber “Pengarus Utamaan Gender PUG’	PKK, Istri SKPD Tuban, Kelompok Perempuan, Pendidik/Guru, TOWA dan TOGA	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban
19	2013	Narasumber Lembaga “Launching Konsultasi Kesejahteraan Keluarga’ Kabupaten Tuban	Pergerakan mahasiswa, PKK, Kelompok Perempuan, Pendidik/Guru, TOWA, LSM dan TOGA	Disnakerduk Trans dan Capil Kabupaten Tuban
20	2013	Program Pelatihan dan Pendampingan “Potret Kemiskinan Perempuan ”	Jaringan LSM dan Cso	Di dukung oleh BPNFI
21	2013-2016	Narasumber “Fasilitasi Kota Layak Anak’	LSM, TOWA, TOGA, SKPD dan PKK	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban
22	2013	Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Tuban	Melibatkan 30 Sekolah Swasta dan Negeri	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban
23	2013-2016	Fasilitasi “pembentukan forum kota layak anak Kabupaten Tuban”	Anak-anak didik kabupaten tuban	Bappemas Kabupaten Tuban
24	2013	Narasumber “fasilitasi PPT bagi korban kekerasan perempuan dan anak”	PKK-sekecamatan tuban	Bapemas, Pemdes dan KB
25	2013	Pelatihan Batik Berbasis	Komunitas Perempuan	Dinas Perekonomian

		Pewarna Alam		Dan Pariwisata
26	2014	Pameran Batik sebagai Produk Unggulan Jawa Timur Di Taman “CANDRA WILWATIKA” Pandaan Jawatimur	Masyarakat di wilayah Pandaan Jawatimur	UPT. Taman Budaya Jawa Timur
27	2014-2015	Pameran Batik sebagai Produk Unggulan Jawa Timur Di “ CIHAMPELAS WALK (CIWALK)” Bandung	Masyarakat di wilayah BANDUNG JAWA BARAT	Dinas Koperasi Jawa Timur
		Expo Produk unggulan Jatim di Grand City Surabaya	Masyarakat Jawa Timur	
28	2008-2016	Narasumber “Sosialisasi UU Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 dalam rangka mencegah kekerasan pada anak”	Melibatkan Tokoh agama, tokoh wanita, tokoh masyarakat sekabupaten Tuban	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban
29	2015-2016	Fasilitasi pelatihan tenaga medis dan tenaga pendamping P2TP2A meningkatkan pelayanan Korban Tindak Kekerasan sesuai PERDA No. 19 Tahun 2013 Kabupaten Tuban	Tenaga Medis (Puskesmas Se Kabupaten Tuban) dan pendamping kecamatan	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban
30	2015	Narasumber Sosialisasi UU Perlindungan Anak dan PERDA Nomer 13 tahun 2013	Skpd, Aparat Desa, Tomas Dan Toga	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban
31	2015	Fasilitasi Seminar “Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Anak”	FORUM ANAK TUBAN	Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban
32	2015	Fasilitasi Rapat Tim P2TP2A tentang SOP PERDA Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	Polres, Kejaksaan, Dinkes, Rsud, Dinsos, Diknas, Dinas Pariwisata, Lbh Unang, Kpr, Pkk	BAPEMAS TUBAN DAN P2TP2A
33	2015	Fasilitator Workshop Implementasi UU. No.35 tahun 2014 dalam mencegah tindak kekerasan terhadap anak	Siswa siswi SMP dan SMA di 14 sekolah	KPR, Polres dan P2TP2A

34	2016	Narasumber Pelatihan “ToF Keaksaraan Fungsional”	Tutor Keaksaraan Fungsional se Kabupaten Tuban	DIKPORA Kabupaten Tuban
35	2016	Fasilitasi Maklumat Pelayanan Puskesmas Se kabupaten Tuban	Puskesmas Se Kabupaten Tuban	Dinas Kesehatan, USAID, Puskesmas dan KPR
36	2016	Narasumber Talk Show Jagongan Matoh “Kemandirian Wanita (Peluang dan Tantangan)”	100 peserta (pengunjung rest area Tuban)	Komite jagongan matoh dan Dinas Perekonomian dan Pariwisata kabupaten Tuban.
37	2016	Panitia Pengawas Penerimaan AKPOL dan Brigpol Tahun Ajaran 2016	25 peserta calon Akpol dan Brigpol	Polres Tuban
38	2016-2017	Pendampingan Hukum (litigasi) dan Non Litigasi “Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin”	Masyarakat miskin di kabupaten Tuban	KEMENKUMHAM
39	2016	Penyuluhan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dan Pemberdayaan	Aparat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tenaga Pendidik dan Masyarakat miskin.	KEMENKUMHAM
40	2017	Penyuluhan Hukum Untuk Masyarakat Miskin “Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”	Aparat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tenaga Pendidik dan Masyarakat miskin.	KEMENKUMHAM
41	2017	Narasumber pelatihan bagi tenaga pendamping korban tindak kekerasan	60 orang terdiri dari organisasi Perempuan, TOGA, TOMA dan TKSK	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
42	2018	Penyuluhan Hukum Untuk Masyarakat Miskin “Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan”Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Aparat Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tenaga Pendidik dan Masyarakat miskin.	KEMENKUMHAM
43	2018	Pemberdayaan Masyarakat “Peran Paralegal Dalam	Aparat Desa, Tokoh Agama, Tokoh	KEMENKUMHAM

bersama dalam menyelamatkan pendidikan yang sarat dengan kepentingan dengan melakukan advokasi dalam lingkungan pendidikan dan melakukan advokasi pendidikan di masyarakat. Adapun kontribusi KP Ronggolawe pada masyarakat diantaranya;

- a. Mba Nunuk Fauziyah selaku direktur KP Ronggolawe ditunjuk sebagai Konsultan CSR Pemberdayaan PT. Semen Indonesia (persero) Tbk Pabrik Tuban untuk mendampingi 26 desa dan 3 Kecamatan yakni Jenu Kerek dan Merakurak di wilayah pengembangan perusahaan tahun 2018-2020. Untuk melakukan pendampingan pemberdayaan. Salah satunya di kelompok Batik Melati yang merupakan dampingan Koalisi Perempuan Ronggolawe sejak tahun 2012.
- b. Koalisi Perempuan Ronggolawe membentuk Sekolah Paralegal Perempuan di kalangan mahasiswa, organisasi dan ibu rumah tangga agar melek hukum dan peduli terhadap perlindungan perempuan dan anak khususnya di Kabupaten Tuban.
- c. Koalisi Perempuan Ronggolawe berjejaring dengan Pemerintah Kabupaten Tuban dalam hal ini Dinas Sosial dan P3A untuk memberikan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Dan melakukan pendampingan kepada korban kekerasan menjadi mandiri dan survive.
- d. Koalisi Perempuan Ronggolawe mendirikan PAUD Taman Kasih Ibu di Desa Banjarworo Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban pada tahun 2009 dan menjaring tenaga pendidik dari warga sekitar yang telah didampingi dan disiapkan menjadi guru oleh KPR sejak tahun 2008. Yang mana latar belakang dari komunitas yakni berpendidikan SD/putus sekolah sehingga mereka lulus S1 tahun 2017.

untuk melakukan pemberdayaan perlu tiga langkah yang berkesinambungan, yaitu:

- a. Pemihakan, artinya perempuan sebagai pihak yang diberdayakan harus dipihaki daripada laki-laki.
- b. Penyiapan, artinya pemberdayaan menuntut kemampuan perempuan untuk bisa ikut mengakses, berpartisipasi, mengontrol, dan mengambil manfaat.
- c. Perlindungan, artinya memberikan proteksi sampai dapat dilepas.

Perempuan di Desa Karanglo, Kerek, Tuban memiliki peran yang tidak kalah penting dalam meningkatkan perekonomian keluarga setelah memiliki ketrampilan membatik. Dari ketrampilan membatik, mereka bisa menjual hasil produksinya kepada masyarakat. Perempuan desa yang pada awalnya kurang produktif dalam mengisi waktu luang, disela-sela waktu dirumah saat menunggu musim tanam dan panen serta menunggu kiriman dari suami yang bekerja menjadi buruh proyek pabrik maupun menjadi petani, kini perempuan menjadi produktif setelah bergabung mengikuti kegiatan di kelompok “Batik Melati” bersama KP Ronggolawe dari adanya program pemberdayaan yang diberikan.

profesional. (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.”

Implementasi program *community development* terkadang belum berhasil meningkatkan kemandirian masyarakat. Faktor yang mempengaruhi hal tersebut diantaranya adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, komunikasi dan koordinasi yang belum menjadi titik temu antara kebijakan pemerintah kabupaten dengan program *community development* perusahaan, sehingga masih tumpang tindih. Sumber daya pelaksana program yang terdiri dari pemerintah daerah, perusahaan dan LSM masih belum memiliki kemampuan dan sisi yang sama dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan konsep *community development* Robert Chamber, maka peran KP Ronggolawe adalah sebagai LSM yang memiliki wewenang dalam proses perumusan perencanaan dan implementasi kebijakan pembangunan. Bentuk implementasi program yang dimaksud adalah pembentukan kelompok “Batik Melati” dimana kegiatan membatik oleh kelompok “Batik Melati” di Desa Karanglo Kerek Tuban yang diberdayakan oleh KP Ronggolawe dilakukan sebagai bentuk upaya kepedulian sosial LSM dalam rangka meningkatkan derajat perempuan desa yang dianggap marginal. Fenomena perempuan desa sebelum adanya kelompok ini adalah; kaum ibu hanya beraktivitas mengurus rumah tangga, mengurus anak dan suami, menjadikan mereka

hanya bergantung pada penghasilan suami. Pekerjaan suami yang hanya buruh tani, petani, buruh pabrik membuat kaum ibu hanya pasrah pada keadaan terkait dengan pendapatan suami yang tentunya sangat pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Atas dasar itulah, maka diperlukan kepedulian dalam menggali potensi diri berupa ketrampilan dengan mengembangkan SDM khususnya ibu rumah tangga agar mereka dapat hidup mandiri dan meningkatkan pendapatan keluarga. Salah satunya melalui program kelompok membuat batik. Kaum ibu di desa Karanglo sebagian besar tidak memiliki ketrampilan membuat batik. Namun, dengan kemauan dan kerja keras mereka untuk belajar dan bergabung dalam kelompok, memudahkan mereka dalam belajar membuat batik meskipun dimulai dari ketidaktahuan. Kelompok “Batik Melati” merupakan salah satu program pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh KP Ronggolawe Tuban yang berupaya untuk melatih dan mengembangkan ketrampilan perempuan di bidang batik yang diharapkan dapat mengubah pola pikir masyarakat untuk mandiri, giat dan tekun dalam menambah ekonomi keluarga dan selanjutnya dapat membantu meningkatkan ekonomi keluarga.

Dengan demikian, peran KP Ronggolawe terhadap pemberdayaan perempuan marjinal melalui kelompok “Batik Melati” dapat dilakukan secara berkesinambungan (*sustainable*). Masyarakat, utamanya kaum perempuan desa Karanglo bukan hanya dianggap sebagai obyek pemberdayaan atau kelompok obyek fungsional saja, melainkan masyarakat juga merupakan subyek pemberdayaan

Ronggolawe. Pemberdayaan dalam kelompok, umumnya berhubungan dengan pola partisipasi kelompok dalam pemberdayaan.

Konsep partisipasi yang dikembangkan berdasarkan pendapat Chamber menitikberatkan pemberdayaan untuk mengatasi masalah ketidakberdayaan masyarakat. Sedangkan KP Ronggolawe yang bertindak sebagai LSM yang memiliki kekuatan, kekuasaan dan tujuan memberdayakan masyarakat telah berinisiatif memberdayakan masyarakat marjinal. Inisiatif tersebut, dikembangkan secara berkelanjutan dalam memberikan pemberdayaan pada kelompok lemah untuk memberi akses permodalan. Akses permodalan, dimaksudkan untuk memudahkan kelompok lemah yakni kelompok “Batik Melati” untuk memenuhi kebutuhan dan pengembangan kelompok.

Kelompok “Batik Melati” berdiri atas dasar persamaan nasib bagi sesama perempuan desa Karanglo. Apabila pemberdayaan hanya mengacu pada personal, maka mustahil akan mencapai tujuan pembangunan. Hal tersebut, menjadi dasar KP Ronggolawe yang merupakan LSM independen non profit dalam membantu kelompok “Batik Melati” berdiri menjadi kelompok batik perempuan yang mengedepankan asas kekeluargaan dan kemandirian. Dengan sikap kelompok yang *outward looking* akan memungkinkan untuk menjalin koneksi dan jaringan kerja yang saling menguntungkan dengan asosiasi atau kelompok di luar kelompoknya. Kemajuan akan lebih mudah dicapai karena lalu lintas pertukaran ide akan terus berkembang dan menstimulasi perkembangan kelompok dan tentu saja individu dalam kelompok “Batik Melati”. Setiap anggota kelompok memiliki akses yang

sama untuk membuat jaringan atau koneksi luar kelompoknya dengan prinsip persamaan, kemanusiaan dan kebebasan yang dimiliki.

3. Kontribusi KP Ronggolawe Berdasarkan Pendapat Chamber

Sebagai penggerak program pemberdayaan perempuan, KP Ronggolawe berdasarkan adanya kesamaan pemikiran, kesamaan nasib dan kesamaan tujuan untuk lebih mandiri secara ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan prinsip Chamber bahwa *community development* merupakan konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Di mana setiap anggota kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama. Setiap keputusan kelompok berdasarkan kesepakatan yang egaliter dari setiap anggota kelompok. Pimpinan kelompok hanya menjalankan kesepakatan yang telah ditentukan oleh para anggota kelompok. Misalnya, anggota kelompok “Batik Melati” sepakat untuk melakukan latihan membatik di tingkat kecamatan 1 bulan sekali, maka ketua kelompok cukup mengatur waktu dan koordinasi dengan KP Ronggolawe untuk melakukan pelatihan di tingkat kecamatan. Hal ini sangat berbeda dengan kelompok tradisional yang memiliki pola hubungan antar-anggota berbentuk pola vertikal. Mereka yang berada di piramida atas memiliki kewenangan dan hak-hak yang lebih besar baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam memperoleh kesempatan dan keuntungan ekonomi.

Nilai sosial yang dijunjung tinggi dalam kelompok “Batik Melati” adalah asas kebebasan. Bahwasanya setiap anggota kelompok bebas berbicara, mengeluarkan pendapat dan mengembangkan kelompok

tersebut. Kebebasan menjadi jati diri kelompok dan anggota kelompok. Melalui kebebasan, akan tercipta ide kreatif muncul dari dalam (kelompok) yaitu dari beragam pikiran anggotanya yang kelak akan memperkaya ide kolektif yang tumbuh dalam kelompok “Batik Melati”. Iklim tersebut memungkinkan munculnya kontribusi besar terhadap perkembangan organisasi.

Selain itu, prinsip lain yang diterapkan dalam kelompok “Batik Melati” adalah kemajemukan (humanitarian). Bahwasanya nilai kemanusiaan, penghormatan terhadap hak-hak asasi setiap anggota dan orang lain merupakan prinsip dasar dalam pengembangan asosiasi, *group*, dan kelompok masyarakat tertentu. Setiap anggota kelompok “Batik Melati” diperbolehkan tidak datang ke lokasi membuat batik yaitu di rumah ketua kelompok jika berhalangan. Halangan disini misalnya; anak sakit, suami sakit, atau ada keperluan lain yang harus diselesaikan oleh anggota. Pada dimensi humanitarian, akan terbangun suatu kesadaran kuat bahwa hidup yang berwarna-warni, dengan beragam suku, warna kulit, dan cara hidup merupakan bagian dari kekayaan manusia. Anggota kelompok akan merasa dihargai apabila keperluan dan kebutuhannya diluar kelompok didengar dan dipenuhi. Dari hal ini juga akan menumbuhkan semangat kemandirian anggota karena besarnya perhatian yang diberikan. Pada tahap kemandirian biasanya merupakan salah satu sikap hidup yang tidak menggantungkan hidup pada orang lain. Pemberian kelonggaran pengerjaan batik di rumah yang diterapkan oleh ketua kelompok “Batik Melati” untuk diselesaikan di rumah masing-masing anggota dan anggota yang sudah mahir membuat batik

kelompok tersebut juga membuat taplak meja, syal, dan sarung laki-laki. Masing-masing barang yang dibuat membutuhkan waktu yang berbeda dalam penyelesaiannya sampai finishing. Pelaksanaan membuat kelompok “Batik Melati” dilakukan di rumah Endrawati yang beralamat di RT/RW 02/01 Dusun Karang Rejo Desa Karanglo. Dari pukul 09.00 – 12.00 WIB. Sistem kerja dilakukan secara mandiri dimana masing-masing anggota kelompok memiliki tugas untuk membuat batik mulai dari pola sampai finishing menggunakan peralatan membuat yang telah disediakan. Teknik membuat pola awal, biasanya dilakukan oleh ketua kelompok dan dilanjutkan oleh anggota yang lain karena tidak semua anggota dalam kelompok mahir membuat pola diawal. Mereka lebih memilih melanjutkan membuat setelah pola selesai dibuat. Apabila pekerjaan membuat belum selesai, maka anggota diperkenankan membawa pulang dan menyelesaikannya di rumah masing-masing. Hal tersebut juga menjadikan anggota bertanggung jawab atas pekerjaannya.

Hal tersebut mengacu pada salah satu tujuan berdirinya KP Ronggolawe yaitu; berperan dalam mengembangkan berbagai pendidikan non formal, pemberdayaan sosial ekonomi guna meningkatkan SDM dan pendapatan keluarga marjinal serta membangun jaringan. Mengembangkan pendidikan non formal yang dilakukannya adalah dengan membentuk kelompok pemberdayaan perempuan, memberikan ketrampilan dan pelatihan serta berupaya agar anggota kelompok terus berubah menjadi terampil. Hubungan kerja antar anggota sebagai rekanan yang diberdayakan juga saling

Ronggolawe dan berkesempatan untuk mengubah kesejahteraan hidup.

2. Pendefinisian kehidupan; perempuan yang diberdayakan oleh KP Ronggolawe memahami akan kebutuhan hidup dan tuntutan zaman. Bahwa perempuan berhak menentukan keinginannya dalam memenuhi kebutuhan melalui kegiatan yang positif.
3. Lembaga; pemberdayaan kelompok oleh KP Ronggolawe pada dasarnya sudah terikat dengan lembaga yang memiliki sasaran pemberdayaan yaitu untuk membantu tingkat kesejahteraan masyarakat.
4. Ide; KP Ronggolawe memberikan wadah mengembangkan bakat perempuan desa Karanglo yaitu dengan membuat melalui kelompok. Pemberdayaan melalui kelompok akan lebih maksimal dibandingkan pemberdayaan mandiri. Hal tersebut dikarenakan, masing-masing anggota dapat bertukar gagasan dan ide dalam hal membuat.
5. Sumber; kelompok “Batik Melati” menjadi sumber utama pemberdayaan KP Ronggolawe yang mampu membangun relasi baik formal, informal dan masyarakat.
6. Aktivitas ekonomi; kegiatan pemberdayaan berupa membuat menjadi perwujudan program KP Ronggolawe dalam memanfaatkan dan mengelola SDM dan SDA yang ada.
7. Reproduksi; kegiatan membuat tidak mengesampingkan tugas utama perempuan. Perempuan yang tergabung sebagai anggota tidak sepenuhnya melepaskan kewajibannya sebagai ibu rumah

tangga. Para anggota tetaplah ibu rumah tangga yang berkewajiban mengurus urusan rumah, anak dan suami tetapi mampu berdaya melalui pendidikan informal kelompok “Batik Melati”.

Dengan demikian, peran KP Ronggolawe dalam implementasi program *community development* berdasarkan pendapat Jim Ife dalam meningkatkan kemandirian masyarakat, telah mengacu pada prinsip kesejahteraan dalam meningkatkan taraf kemandirian masyarakat. Berdasarkan pemaparan poin diatas, pemberdayaan kelompok yang dilakukan oleh KP Ronggolawe tidak semata-mata didominasi elite penguasa baik dari LSM maupun perangkat desa setempat. Peran KP Ronggolawe dalam pemberdayaan yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku dan sasaran utama, tetap mengedepankan asas-asas kemanusiaan yang tidak merugikan satu sama lain akan tetapi memberikan kemanfaatan berkelanjutan melalui kelompok. Hal tersebut juga merupakan cerminan program *community development* yang tidak hanya memberikan kemanfaatan bagi satu pihak.

2. Strategi KP Ronggolawe dalam Pemberdayaan Perempuan Menurut Ife

Menurut Jim Ife, program pemberdayaan masyarakat harus selalu berupaya untuk memaksimalkan partisipasi, dengan tujuan membuat setiap orang dalam masyarakat terlibat secara aktif dalam

Berdasarkan pijakan tersebut, KP Ronggolawe sebagai LSM yang peduli terhadap kelompok masyarakat secara massif merangkul elemen masyarakat utamanya perempuan untuk senantiasa berperan aktif dalam memberdayakan perempuan dengan memperhatikan kebutuhan dan kewajiban domestiknya untuk menjadi obyek pemberdayaan maupun menjadi *stake holder* pemberdayaan demi mewujudkan pembangunan nasional. KP Ronggolawe memiliki komitmen melakukan advokasi kebijakan publik, pendampingan korban kekerasan perempuan dan anak, pendidikan alternatif berbasis gender supaya memperoleh hak dasar pendidikan dan mendorong kemandirian perempuan di wilayah pedesaan, pemberdayaan masyarakat untuk mendorong kemandirian dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi pedesaan serta penyuluhan dan bantuan hukum bagi masyarakat marjinal.

3. Kontribusi KP Ronggolawe Berdasarkan Konsep Jim Ife

Program pemberdayaan masyarakat khususnya pada kaum ibu yang dilakukan oleh KP Ronggolawe terhadap kelompok “Batik Melati” menjadikan masyarakat lebih mampu untuk mendefinisikan kebutuhan mereka. Fakta bahwa perempuan termarginalkan di desa Karanglo menuntut mereka untuk mempelajari ketrampilan baru yaitu membatik. Program pemberdayaan oleh KP Ronggolawe terhadap perempuan marjinal di desa Karanglo Kerek Tuban bertujuan untuk meningkatkan kesadaran perempuan agar lebih berdaya dan mampu mengembangkan potensi diri yang dimiliki sehingga perempuan tidak bergantung pada

Robert Chamber dan Jim Ife dan diaplikasikan oleh KP Ronggolawe dalam memberdayakan perempuan dalam kelompok “Batik Melati” berjalan dengan keterpaduan yang seimbang. Jika konsep pemberdayaan masyarakat menurut Robert Chamber dititikberatkan pada peran LSM pendamping dan wewenangnya, maka KP Ronggolawe berfungsi sebagai *operator* dalam mengatur berbagai bentuk regulasi kelompok pemberdayaan. Fungsi LSM yang mengatur regulasi kelompok juga mencakup pendanaan kelompok pemberdayaan. Sedangkan konsep pemberdayaan masyarakat oleh Jim Ife lebih menekankan pada obyek pemberdayaan itu sendiri yang dilakukan secara kontinyu dan terus menerus. Dengan kata lain, konsep *community development* oleh kedua tokoh Robert Chamber dan Jim Ife dapat berjalan beriringan. Jika konsep Chamber memperhatikan *operator* pemberdayaan masyarakat maka Ife memperhatikan obyek pemberdayaan itu sendiri yang akan menghasilkan pemberdayaan yang maksimal dengan memperhatikan segala aspek dan bagian penting dalam proses pemberdayaan.

Dalam hal strategi pemberdayaan masyarakat, yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat lokal di pedesaan, konsep partisipasi diartikan sebagai jaringan hubungan segitiga antara pemerintah daerah dan perusahaan dengan masyarakat. Jaringan ini merupakan manifestasi hubungan egaliter bagi ketiga pilar program yang mengarah pada pembangunan kepercayaan, kerjasama dan kemandirian yang merupakan pilar dari modal sosial, sehingga dilakukan sinergi efektif terhadap program pemberdayaan masyarakat yang selama ini masih belum optimal. Bentuk partisipasi masyarakat lokal melalui program pemberdayaan perempuan utamanya, akan sangat berpengaruh pada keberhasilan program

program *community development* dengan menggunakan pendekatan *development with community*.

Para kaum ibu yang turut bergabung didalam kelompok “Batik Melati” memperoleh pelatihan secara terbimbing dari KP Ronggolawe juga dari dinas sosial kabupaten. Selain mendapatkan ketrampilan, mereka juga belajar tentang nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat. Nilai-nilai sosial, nilai kebebasan dan norma informal yang dimiliki Bersama di antara para anggota, akan memudahkan kelompok yang melakukan kerjasama. Dalam hal pengembangan ketrampilan dan pendanaan, kelompok “Batik Melati” dibantu oleh CSR PT. SG yang diprakarsai oleh KP Ronggolawe. Hal ini menjadi sangat ditentukan bagaimana perusahaan PT. SG mengimplementasikan program *community development* melalui konsep *triple bottom line* secara sistematis dan komprehensif yaitu dengan pemberdayaan lokal berupa pelestarian batik dengan ketrampilan kelompok, tanggung jawab sosial dan pelestarian lingkungan.

Kegiatan pemberdayaan pada kelompok “Batik Melati” juga berhubungan dengan PT SG yang menggelar pelatihan melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*). CSR atau yang dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilatarbelakangi tahapan sejarah yang cukup panjang. Banyak perusahaan yang masih memfokuskan dirinya sebagai organisasi yang mencari keuntungan. Mereka memandang bahwa sumbangan kepada masyarakat cukup diberikan keuntungan dalam bentuk penyediaan tenaga kerja, pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui produk yang dihasilkan perusahaan dan pembayaran pajak

- Huraerah, Abu. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*. Bandung: Humaniora, 2008.
- Hutomo, M. Y. *Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi: Tinjauan teoritik dan implementasi*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Naskah No.20, Juni-Juli 2000.
- Ife, Jim & Tesoriero Frank. *Community Development: Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Diterjemahkan Sastrawan Manullang, Nurul Yakin & M. Nursyahid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ife, Jim. *Community Development: Community Base Alternatives in an Age of Globalization*. Australia: Pearson Education Australia Pty. Ltd, 2002.
- Istiqamah, Supriyati. *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat Islam*. Bandar Lampung : Fakultas Dakwah, 2008.
- Jurnal Hukum, *Jurisprudence*, Vol. 8, Nomor 2, Tahun 2018.
- Jurnal Karsa, Vol. 19 No 2 Tahun 2012.
- Kasiram, Moh. *Metodologi Penelitian*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Komnas Perempuan, *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta, 2017.
- Korten, D.C & Sjahirir, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1988.
- Korten, David C. *Menuju Abad Ke-21 Tindakan Sukarela dan Agenda Global*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Luthfiyah, Dr. Fitrah, Muh. *Metodologi Penelitian, (Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus)*, Sukabumi: CV Jejak, 2017.
- Marmoah, Sri. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan Rimba*, Yogyakarta: Deepublish, 2014.
- Miles, Matthew and Huberman Michael A. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemah Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press. 1992.
- Mosse, Julia Cleves. *Gender dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2007.
- Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif Telaah Positivistik, Rasionalisti, Plenomenologik, dan Realisme Metaphisik*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991.
- Nabawi, Handari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada Pres, 2005.
- Narbuko, Chalid dan Achmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 2003.
- Nazir, Moh. “*Metode Penelitian*”, Bogor: Galia Indonesia, 2005.
- Neuman, R.P dan Hirsch. *Commercialization of Non-Timber Forest Product: Reviews and Analysis of Research*. CIFOR Indonesia dan FAO, Italia, 2000.
- Nindita, Radyati. R. Maria. *CSR Untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal*. Jakarta: Indonesia Bussiness Links, 2008.
- Nugroho, Riant. *Public Policy: Teori Kebijakan – Analisis Kebijakan – Proses*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008.
- Perpustakaan Yayasan Hatta Yogyakarta, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993.
- Prijono O. S. & Pranaka, A.M. W. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Center for Strategic and International Studies, 1996.
- Profil Koalisi Perempuan Ronggolawe, Tuban, 2020.
- Program Studi Kajian Wanita. *Perempuan dan Pemberdayaan*. Jakarta: Penerbit Obor, 1997.
- QS Al-Hujurat:13
- QS. Ar Rum:21
- Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Penerbit Mizan, 1992.

- Rinawati, Rini. *Pemberdayaan Perempuan Dalam Tridaya Pembangunan Melalui Pendekatan Komunikasi Antarpribadi Kajian Fenomenologis Mengenai Konstruksi Realitas Sosial Pemberdayaan Perempuan Melalui Pnpm Mandiri P2KP*. Prosiding SNaPP2010 Edisi Sosial. ISSN: 2089-3590.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J, *Teori Sosiologi Modern*. Kencana, Jakarta. 2004.
- Rizkia, Frida Nur, *Peran Perempuan dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Melalui Program P2wkss Di Sumber Gamol, Balecatur, Gamping, Sleman*, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial UNY, 2017.
- Rogers, C.R. *Client Centered Therapy*. Boston: Houghton Mifflin Company. 1951.
- Sari, Andriani. "Pengaruh BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai". Repository Universitas Sumatera Utara, 2017. diakses pada tanggal 12 Februari 2020
- Schimmel, Annemarie. *Jiwaku Adalah Wanita*, Bandung: Mizan, 1998.
- Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat 2018 Universitas Amikom Yogyakarta, 3 November 2018. ISSN : 2615-2657
- Skripsi *Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Industri Kecil Di Pedesaan (Studi Dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Serang Di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan)*, Nika Rizqi Fitriana, Jurusan Sosiologi Dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. 2016.
- Skripsi, *Pemberdayaan Kaum Perempuan Dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Home Industry Bulu Mata Sokawera Cilongok Banyumas)*, Anifatus Solihah, Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. 2016.
- Skripsi, *Peran Perempuan dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Melalui Program P2wkss Di Sumber Gamol, Balecatur, Gamping, Sleman*, Frida Nur Rizkia, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2017.
- Soetomo, *Strategi-Strategi Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Soetrisno, Loekman. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Solihah, Anifatus *Pemberdayaan Kaum Perempuan Dalam Menunjang Peningkatan Pendapatan Keluarga Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Home Industry Bulu Mata Sokawera Cilongok Banyumas)*, Skripsi Ekonomi Syari'ah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2016.
- Srilatha Batliawala. *The Meaning of Womens Empowerment: New Concepts from Action dalam Gita Sen, et al. Population Policies Resconsidered Health, Empowerment and Rights*. Newyork: International's Women Health Coalition (IWHC). 1994.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta, CV.2017.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Suharto, Edi. *Pembangunan, Kebijakan Sosial, dan Pekerjaan Sosial; Spektrum Pemikiran*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 1997.
- Sulistiyani, Teguh. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media, 2004.
- Suradi. *Pembangunan manusia kemiskinan dan kesejahteraan sosial: Kajian tentang kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial di Nusa Tenggara Barat*. Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 12(3), 2007.
- Suryabrata, Suharsimi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1987.

- Susan, Kenny. *Developing Communities for The Future*, Melbourne: Nelson An International Thomson Publishing Company, 1994.
- Tahir, Ratnawati. *Pendidikan Alternatif Untuk Perempuan Marginal Di Pedesaan*. Jurnal Ilmu Pendidikan, Jilid 17, Nomor 4, Februari 2011.
- Trucker, Judith E. *Women in Nineteenth-Century Egypt*, Cambridge: Cambridge University Press. 1985.
- Usman, H. *Model Pendidikan Kecakapan Hidup sebagai Alternatif Mengurangi Angka Kemiskinan*. Jurnal Ilmu Kependidikan, 2010.
- Vercellis, C. *Business Intelligence: Data Mining and Optimization for Decision Making*. England: John Wiley & Sons, 2009.
- Warti'ah, *Observasi*, 10 Februari 2020.
- Warti'ah, *Wawancara*, Tuban, 27 Januari 2020.
- Wibisono, Yusuf. *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*. Gresik: Fascho Publishing, 2007.
- Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat Wacana dan Praktik*. Jakarta : Kencana, 2006.

